

## **ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM PEMBANGUNAN BERBASIS DESA DI ERA OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA)**

**<sup>1</sup>Anisa Wulan Sari, <sup>2</sup>\* Maria Ekowati**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

<sup>2</sup> Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Universitas Terbuka

anisawln506@gmail.com , maria\_ekowati@ipdn.ac.id

### **ARTICLE INFO**

#### **Article history:**

Received April 24, 2026

Revised June 10, 2026

Accepted July 10, 2026

Available online July 15, 2026

**Kata Kunci:** implementasi kebijakan; partisipasi masyarakat; pembangunan desa

**Keywords:** *policy implementation; community participation; village development*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan berbasis desa di era otonomi daerah, meskipun pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai kebijakan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program pembangunan berbasis desa serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi masyarakat serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program pembangunan desa di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka melalui pengumpulan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan pemerintah, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat melalui

musyawarah desa, pemberdayaan masyarakat, dan transparansi program pembangunan. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala seperti rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, kurangnya sosialisasi kebijakan, serta keterbatasan sumber daya aparatur desa. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat guna mewujudkan pembangunan desa yang partisipatif, efektif, dan berkelanjutan.

### **ABSTRACT**

*This research is motivated by the suboptimal community participation in village-based development programs in the era of regional autonomy, despite the implementation of various policies by local governments to encourage community involvement in the development process. The research problem is how local government policies are implemented to increase community participation in village-based development programs, as well as the factors that support and hinder their implementation. This study aims to analyze the implementation of local government policies to encourage community participation and identify the supporting and inhibiting factors in the implementation of village development programs in Indonesia. The method used is a qualitative approach with a literature review. Data were collected from various sources, such as books, scientific journals, government regulations, and related documents. The results indicate that the implementation of local government policies has had a positive impact on increasing community participation through village deliberations, community empowerment, and transparency in development programs. However, various obstacles remain, such as low levels of community education, lack of policy dissemination, and limited village apparatus resources. The implications of this research indicate the need to strengthen coordination between local governments and communities to achieve participatory, effective, and sustainable village development.*

## PENDAHULUAN

Era otonomi daerah di Indonesia telah membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan, khususnya dalam hal desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diharapkan mampu mempercepat pembangunan serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan tidak lagi bersifat top-down semata, tetapi juga mengedepankan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam setiap proses pembangunan. Dalam konteks pembangunan berbasis desa, partisipasi masyarakat menjadi elemen yang sangat penting karena desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional yang memiliki potensi sumber daya lokal yang besar, namun sering kali belum dioptimalkan secara maksimal akibat rendahnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan, sehingga kebijakan pemerintah daerah perlu dianalisis secara mendalam.

Secara teoritis, implementasi kebijakan publik tidak hanya berhenti pada tahap perumusan, tetapi juga mencakup proses pelaksanaan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Edward III dalam penelitian (Syafli, 2026) yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh sinergi antar komponen tersebut, sehingga dalam konteks pembangunan desa, keberhasilan program sangat bergantung pada bagaimana pemerintah daerah mampu mengelola kebijakan tersebut agar dapat dipahami, diterima, dan dilaksanakan oleh masyarakat desa secara aktif dan partisipatif. Selain itu, menurut (Setiawan, 2026) partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan akses informasi, serta kurangnya pendampingan dari pemerintah desa maupun pemerintah daerah, yang pada akhirnya berdampak pada belum optimalnya hasil pembangunan di tingkat desa.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program pembangunan berbasis desa di era otonomi daerah, Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program pembangunan berbasis desa, Serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program pembangunan berbasis desa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program pembangunan desa di Indonesia. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu administrasi publik dan kebijakan publik, serta secara praktis dapat menjadi

bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat pada program pembangunan berbasis desa agar lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*), yaitu suatu metode yang berfokus pada pengumpulan, penelaahan, dan analisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian mengenai implementasi kebijakan pemerinh daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program pembangunan berbasis desa di era otonomi daerah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber sekunder seperti buku-buku ilmiah, jurnal penelitian, peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, serta dokumen resmi yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan pembangunan desa dan partisipasi masyarakat, sehingga seluruh data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan dan analisis data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri berbagai literatur yang relevan, baik dalam bentuk cetak maupun digital, yang membahas tentang kebijakan publik, otonomi daerah, pembangunan desa, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih, memilah, dan memfokuskan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian agar data yang digunakan benar-benar relevan dan mendukung analisis.
3. Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi yang telah direduksi secara sistematis berdasarkan konsep-konsep utama seperti implementasi kebijakan, partisipasi masyarakat, dan pembangunan berbasis desa.
4. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan berbagai konsep dan teori yang telah dikaji sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di tingkat desa.

Dalam kerangka analisis, penelitian ini menggunakan beberapa konsep utama yang saling berkaitan, yaitu konsep kebijakan publik yang menekankan bahwa kebijakan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat, kemudian konsep implementasi kebijakan yang menjelaskan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh proses pelaksanaan di lapangan yang dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Edward III dalam penelitian (Syafli, 2026), serta konsep partisipasi masyarakat yang dipahami sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan desa, sehingga ketiga konsep tersebut menjadi dasar dalam menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah daerah dapat berjalan secara efektif

dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat pada pembangunan berbasis desa di era otonomi daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Berbasis Desa**

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan berbasis desa di era otonomi daerah merupakan suatu proses yang kompleks dan multidimensional, karena tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan aturan formal yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola komunikasi kebijakan, menyediakan sumber daya yang memadai, membangun komitmen aparatur pelaksana, serta menciptakan struktur birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa, sebagaimana dijelaskan oleh Edward III (1980) pada penelitian (Arum, 2025) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh empat variabel utama tersebut yang saling berhubungan secara sistematis dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Dalam konteks pembangunan berbasis desa di Indonesia, implementasi kebijakan pemerintah daerah pada dasarnya telah diarahkan untuk menciptakan ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat melalui mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pengelolaan dana desa yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, namun dalam praktiknya tingkat partisipasi masyarakat masih menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar daerah, yang disebabkan oleh perbedaan tingkat pendidikan, akses informasi dan budaya lokal.

Sejalan dengan itu, (Sony dkk, 2025) yang menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan berbasis partisipasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran atau regulasi, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, karena partisipasi yang bersifat formalitas tanpa keterlibatan substantif justru dapat mengurangi kualitas pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam konteks ini harus mampu memastikan bahwa masyarakat tidak hanya hadir secara fisik dalam forum musyawarah, tetapi juga memiliki kapasitas dan keberanian untuk menyampaikan aspirasi serta terlibat dalam proses pengawasan pembangunan. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai implementasi kebijakan tersebut, maka hasil kajian dapat dirangkum dalam tabel berikut:

***Tabel 1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah***

| No | Aspek Implementasi | Bentuk Implementasi di Lapangan | Kondisi dan Temuan Kajian | Keterkaitan dengan Teori |
|----|--------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|
|----|--------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|

|   | Kebijakan              |                                                                         |                                                                               |                                                        |
|---|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1 | Komunikasi Kebijakan   | Sosialisasi program pembangunan melalui musyawarah desa dan aparat desa | Informasi belum merata dan masih didominasi oleh perangkat desa               | komunikasi menentukan pemahaman kebijakan              |
| 2 | Sumber Daya            | Pengalokasian dana desa dan tenaga pendamping desa                      | Dana cukup tersedia, namun kapasitas SDM desa masih terbatas                  | Implementasi efektif membutuhkan sumber daya memadai   |
| 3 | Disposisi Pelaksana    | Sikap aparat desa dalam mendukung program partisipatif                  | Sebagian aparat mendukung, namun masih ada yang bersifat administratif formal | Sikap pelaksana mempengaruhi keberhasilan kebijakan    |
| 4 | Struktur Birokrasi     | Pembentukan BPD dan mekanisme Musrenbangdes                             | Struktur sudah ada, namun koordinasi belum optimal                            | Struktur birokrasi menentukan efektivitas implementasi |
| 5 | Partisipasi Masyarakat | Keterlibatan dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan               | Partisipasi cenderung pasif dan bersifat formalitas                           | Partisipasi harus bersifat substantif                  |

Sumber:<sup>1</sup> Edward III (1980), <sup>2</sup> (Setiawan 2026), <sup>3</sup> (Mansur, 2021),<sup>4</sup> ( Sutmasa, 2021)

<sup>5</sup> (Mardiasmo 2009).

Berdasarkan tabel tersebut dapat dipahami bahwa secara normatif implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat telah memiliki kerangka yang cukup kuat melalui regulasi otonomi daerah dan kebijakan dana desa, namun secara empiris masih terdapat kesenjangan antara konsep ideal dan realitas di lapangan, di mana partisipasi masyarakat belum sepenuhnya bersifat aktif dan kritis, melainkan masih cenderung bersifat simbolik dalam forum formal seperti musyawarah desa, sehingga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, aparat desa, dan masyarakat itu sendiri dalam menciptakan ruang partisipasi yang benar-benar inklusif dan berkelanjutan.

#### **Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Desa**

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan berbasis desa di era otonomi daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang bersifat mendukung maupun yang menjadi hambatan, sehingga keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya ditentukan oleh aspek regulasi semata, tetapi juga oleh kondisi sosial, kapasitas kelembagaan, serta kualitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Secara umum, faktor pendukung muncul dari adanya kebijakan desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dan desa untuk mengelola pembangunan, sedangkan faktor penghambat lebih banyak berkaitan dengan kondisi internal masyarakat dan aparat desa yang belum sepenuhnya siap dalam melaksanakan prinsip-prinsip

partisipatif secara optimal.

Pertama, faktor pendukung utama dalam implementasi kebijakan ini adalah adanya regulasi otonomi daerah dan kebijakan dana desa yang memberikan ruang fiskal dan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah desa untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat, sehingga secara teoritis kondisi ini sejalan dengan prinsip desentralisasi yang dikemukakan oleh (Latif & Soleman, 2024) yang menyatakan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan apabila dilaksanakan secara efektif. Selain itu, meningkatnya akses teknologi informasi juga menjadi faktor pendukung penting karena memudahkan penyebaran informasi pembangunan desa, meskipun tingkat pemanfaatannya masih belum merata di seluruh wilayah desa.

Kedua, faktor pendukung lainnya adalah adanya komitmen pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mendorong keterlibatan masyarakat melalui forum musyawarah desa, pendampingan program, serta pelibatan lembaga kemasyarakatan desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang secara konseptual sejalan dengan pendapat (Harahap dkk, 2024) bahwa partisipasi masyarakat akan meningkat apabila pemerintah mampu menciptakan ruang interaksi yang terbuka, komunikatif, dan inklusif dalam proses pembangunan.

Namun demikian, di sisi lain terdapat berbagai faktor penghambat yang cukup signifikan yang menyebabkan implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal, di antaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat desa terhadap pentingnya partisipasi dalam pembangunan, sehingga masyarakat cenderung bersikap pasif dan menyerahkan seluruh proses pengambilan keputusan kepada aparat desa. kondisi ini sejalan dengan temuan Cohen dan Uphoff dalam penelitian (Ayu Vernanda, 2025) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, kesadaran, serta akses terhadap informasi pembangunan. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa juga menjadi hambatan serius dalam mengelola program pembangunan secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga sering kali terjadi ketidakefisienan dalam pelaksanaan program di lapangan.

Selanjutnya, kurang optimalnya sosialisasi kebijakan dari pemerintah daerah kepada masyarakat juga menjadi faktor penghambat yang cukup dominan, karena informasi mengenai program pembangunan sering kali tidak tersampaikan secara menyeluruh, sehingga menimbulkan kesenjangan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa. Selain itu, faktor budaya lokal juga turut mempengaruhi pola partisipasi masyarakat, di mana dalam beberapa kasus masih ditemukan budaya paternalistik yang membuat masyarakat lebih cenderung mengikuti keputusan aparat desa tanpa adanya kritik atau masukan yang konstruktif. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, berikut disajikan tabel faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan:

**Tabel 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pembangunan Berbasis Desa**

| No | Faktor Pendukung                                                           | Faktor Penghambat                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | Adanya regulasi otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas kepada desa | Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa                  |
| 2  | Dukungan dana desa yang meningkatkan kapasitas pembangunan                 | Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pembangunan |
| 3  | Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyebaran informasi                 | Sosialisasi kebijakan yang belum merata                       |
| 4  | Komitmen pemerintah daerah dan desa dalam pembangunan partisipatif         | Keterbatasan kapasitas aparatur desa                          |
| 5  | Keterlibatan lembaga desa seperti BPD                                      | Budaya masyarakat yang cenderung pasif dan paternalistik      |

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan berbasis desa pada dasarnya memiliki potensi yang sangat besar untuk berhasil, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengatasi berbagai hambatan yang ada, terutama dalam aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan komunikasi kebijakan, serta perubahan pola pikir masyarakat agar lebih aktif dan kritis dalam proses pembangunan, sehingga pembangunan desa dapat benar-benar bersifat partisipatif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

#### **Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Desa**

Berdasarkan hasil kajian pustaka, berbagai faktor penghambat implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan berbasis desa perlu diatasi melalui upaya yang terencana dan berkelanjutan. Hambatan seperti rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, kurangnya sosialisasi kebijakan, keterbatasan kapasitas aparatur desa, serta budaya masyarakat yang masih pasif dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan pemerintah desa perlu melakukan berbagai langkah strategis agar masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan desa.

Upaya pertama yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kualitas sosialisasi dan komunikasi kebijakan kepada masyarakat. Informasi mengenai program pembangunan desa harus disampaikan secara terbuka, mudah dipahami, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai media komunikasi, baik secara langsung melalui musyawarah desa maupun melalui media digital dan media informasi desa. Menurut Edward III dalam penelitian (Cahyono, 2026) komunikasi merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan karena masyarakat harus memahami tujuan, manfaat, dan mekanisme pelaksanaan kebijakan agar dapat berpartisipasi secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan

intensitas sosialisasi akan membantu mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat.

Upaya kedua adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Rendahnya tingkat pendidikan sering menjadi penyebab masyarakat kurang memahami pentingnya keterlibatan dalam pembangunan. Menurut Cohen dan Uphoff dalam penelitian (Ayu Vernanda, 2025), tingkat partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat dalam memahami proses pembangunan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menyelenggarakan program pelatihan, penyuluhan, dan pendidikan masyarakat secara berkelanjutan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk menyampaikan aspirasi serta mengawasi jalannya pembangunan desa.

Upaya ketiga adalah memperkuat kapasitas aparatur desa melalui pelatihan administrasi pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pengelolaan keuangan desa. Aparatur desa yang memiliki kompetensi tinggi akan lebih mampu melaksanakan kebijakan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Menurut (Kaseng, 2023) peningkatan kapasitas kelembagaan desa merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan pembangunan yang partisipatif dan efektif. Dengan demikian, peningkatan kompetensi aparatur desa akan mendukung terciptanya hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat.

Upaya keempat adalah memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana peningkatan partisipasi masyarakat. Perkembangan teknologi dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi pembangunan, laporan penggunaan dana desa, jadwal musyawarah desa, serta berbagai program pemerintah yang sedang dilaksanakan. Menurut (Pribadi et al, 2025) pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

Upaya kelima adalah memperkuat peran lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), serta organisasi kemasyarakatan lainnya. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan baik. Menurut (Azkiya & Kriswanto, 2024) keterlibatan lembaga masyarakat dalam pembangunan mampu meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat karena masyarakat memiliki wadah yang jelas untuk menyampaikan kebutuhan dan permasalahannya.

Selain itu, pemerintah desa perlu membangun budaya partisipatif melalui pendekatan yang lebih inklusif dan demokratis. Budaya paternalistik yang masih berkembang di beberapa desa menyebabkan masyarakat cenderung menerima keputusan pemerintah tanpa memberikan masukan yang konstruktif. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu menciptakan lingkungan yang mendorong masyarakat untuk berani menyampaikan pendapat, kritik, dan saran dalam setiap proses pembangunan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan.

**Tabel 3 Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pemerintah**

| No | Faktor Penghambat                                             | Upaya Mengatasi                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat                       | Melaksanakan pelatihan, penyuluhan, dan program pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan |
| 2  | Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pembangunan | Meningkatkan sosialisasi kebijakan melalui musyawarah desa dan media informasi desa          |
| 3  | Sosialisasi kebijakan belum merata                            | Memanfaatkan teknologi informasi dan media digital desa untuk penyebaran informasi           |
| 4  | Keterbatasan kapasitas aparatur desa                          | Menyelenggarakan pelatihan manajemen pemerintahan dan pengelolaan pembangunan desa           |
| 5  | Budaya masyarakat yang pasif dan paternalistik                | Mendorong forum diskusi partisipatif dan memperkuat peran lembaga desa                       |

Sumber: <sup>1</sup>(Valentina et al ,2024) ,<sup>2</sup>( Herman et al 2024), <sup>3</sup>( Mozin & Tantu ,2025),  
<sup>4</sup>(Siregar & Suryani ,2025), <sup>5</sup>( Kaesang, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa upaya mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan pemerintah daerah memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat. Keberhasilan pembangunan berbasis desa tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan regulasi dan anggaran, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat komunikasi kebijakan, memanfaatkan teknologi informasi, serta membangun budaya partisipatif yang memungkinkan masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pembangunan. Dengan demikian, tujuan pembangunan desa yang partisipatif, efektif, dan berkelanjutan dapat diwujudkan secara lebih optimal.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program pembangunan berbasis desa di era otonomi daerah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program pembangunan berbasis desa telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari adanya berbagai kebijakan dan mekanisme partisipatif yang telah diterapkan, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pengelolaan dana desa yang melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Namun, dalam pelaksanaannya partisipasi masyarakat masih cenderung bersifat formalitas dan belum sepenuhnya mencerminkan keterlibatan yang aktif, kritis, dan substantif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pembangunan desa.

Faktor pendukung implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan

partisipasi masyarakat meliputi adanya regulasi otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah desa, dukungan dana desa yang cukup memadai, pemanfaatan teknologi informasi sebagai media penyebaran informasi pembangunan, komitmen pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mendorong pembangunan partisipatif, serta keterlibatan lembaga desa seperti BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Sementara itu, faktor penghambat yang masih ditemukan antara lain rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pembangunan, belum optimalnya sosialisasi kebijakan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, serta budaya masyarakat yang masih bersifat pasif dan paternalistik.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan adalah dengan meningkatkan kualitas komunikasi dan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat secara berkelanjutan, memperkuat kapasitas sumber daya manusia masyarakat melalui pendidikan dan pemberdayaan, meningkatkan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan, memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana transparansi dan penyebaran informasi pembangunan, serta memperkuat peran lembaga kemasyarakatan desa dalam membangun budaya partisipatif. Melalui upaya-upaya tersebut diharapkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat meningkat sehingga tujuan pembangunan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan dapat tercapai.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah, perlu meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan koordinasi dengan pemerintah desa dalam pelaksanaan program pembangunan berbasis desa. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperluas sosialisasi kebijakan pembangunan agar informasi dapat diterima secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Bagi Pemerintah Desa, perlu meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi terkait program pembangunan, penggunaan dana desa, serta hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Pemerintah desa juga perlu menciptakan ruang partisipasi yang lebih inklusif agar masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.
3. Bagi Masyarakat Desa, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasinya dalam berbagai program pembangunan desa, tidak hanya sebagai penerima manfaat tetapi juga sebagai pelaku pembangunan yang aktif dalam memberikan masukan, pengawasan, serta evaluasi terhadap kebijakan dan program yang dilaksanakan.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lapangan secara langsung pada desa atau daerah tertentu agar diperoleh data empiris yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah dan tingkat partisipasi

masyarakat dalam pembangunan berbasis desa, sehingga dapat melengkapi hasil penelitian yang menggunakan metode studi pustaka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alim, M. S. (2025). *Kebijakan pemerintah terkait kawasan tanpa rokok dan dana desa (studi kasus Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango)*. CV Eureka Media Aksara.
- Arum, M. P. (2025). *Implementasi kebijakan perizinan untuk penertiban kegiatan masyarakat di Polresta Bandar Lampung* (Skripsi, tidak dipublikasikan).
- Ayu Vernanda, D. (2025). *Partisipasi masyarakat dalam program Posyandu sebagai upaya mengoptimalkan pelayanan kesehatan desa (studi pada Desa Jeblog Kecamatan Talun)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Balitar, Blitar).
- Ayu Vernanda, D. (2025). Partisipasi masyarakat dalam program posyandu sebagai upaya mengoptimalkan pelayanan kesehatan desa (Studi pada Desa Jeblog Kecamatan Talun) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Balitar, Blitar).
- Azkiya, I. I., & Kriswanto, H. D. (2024). Peran lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(4), 724–739.
- Cahyono, Y. (2026). Koordinasi antar lembaga dalam implementasi kebijakan publik: Studi kualitatif tata kelola kolaboratif. *Journal of Law, Policy, and Governance*, 1(1), 14–19.
- Erowati, D., & Sos, S. (2021). *Kebijakan dana desa bagi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa*. Scopindo Media Pustaka.
- Gusman, D. (2023). Model partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah sebagai perwujudan demokrasi substantif. *UNES Law Review*, 5(3), 847-862.
- Handraini, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2024). Konsep desentralisasi dan otonomi daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa di Indonesia. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 11(2), 601–608.
- Harahap, T. A. P., Viranda, A., Riski, A. P., Safitri, A. A., Fadilla, N., & Girsang, R. N. (2024). Efektivitas penerapan peraturan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 10(04), 465–481.
- Herman, H., Halim, D., & Purna, Z. A. (2024). PKM sosialisasi kebijakan peraturan pemerintah desa di Kabupaten Pinrang. *Pinisi Journal of Community Service*, 99–105.
- Irawan, N. (2017). *Tata kelola pemerintahan desa era UU Desa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kaseng, E. S. (2023). Analisis pendekatan komunikasi partisipatif lembaga desa dalam pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Riset Pembangunan*, 1(3), 42–52.
- Latif, F. H., & Soleman, I. (2024). Pseudo otonomi desa: Problematika implementasi kebijakan otonomi desa di Desa Juanga. *Musamus Journal of Public Administration*, 6(2), 670–680.
- Mansur, J. (2021). Implementasi konsep pelaksanaan kebijakan dalam publik. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324-334.
- Mozin, S. Y., & Tantu, R. (2025). Transformasi digital desa: Optimalisasi website sebagai media informasi masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(12), 5575–5582.
- Pribadi, K. I., Santoso, S. E. B., Dirgantari, N., & Hartikasari, A. I. (2025). Pengaruh komitmen organisasi, transparansi, pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 13(1), 39–52.
- Puspitarini, S., & Indartuti, E. (2025). Eksistensi pemerintahan daerah Kota Kediri dalam

- perspektif otonomi dan partisipasi masyarakat. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(6).
- Sa'diyin, M., Sutopo, S., & Lubaba, H. (2026). Otonomi daerah, kebijakan publik, dan penguatan demokrasi lokal di Kabupaten Lamongan. *JOSH: Journal of Sharia*, 5(01), 50–64.
- Setiawan, A. (2026). *Pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat*. Deepublish.
- Siregar, D. R. B., & Suryani, A. (2025). Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan manajemen SDM berbasis kompetensi di Desa Tanjung Siram, Kecamatan Bilah Hulu. *Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(3), 273–279.
- Sony, E., Alya'Labibah, H., Mangar, I., Hariri, A., Fernando, Z. J., Yamani, M., et al. (2025). *Hukum pemerintahan desa dan desa adat di Indonesia*. CV. Gita Lentera.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan efektivitas implementasi kebijakan publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25-36.
- Syafli, Q. S. (2026). *Implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah di Desa Tabarano = Implementation of policies in waste management in Tabarano Village* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Valentina, A., Putri, R. A., & Marliani, M. (2024). Forum group discussion pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pemetaan potensi sumber daya alam di Desa Busung Panjang. *Jurnal Pengabdian Negeri*, 1(1), 37–47.